

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Efik Yusdiansyah, *Implikasi keberadaan MAHKAMAH KONSTITUSI terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka NEGARA HUKUM*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.

Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ronald S. Lumbun, PERMA RI, *Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Sjcahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*,

Bandung, Alumni, 1985.

Sarman dan Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di*

*Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung,

2005.

Syaikh Walid bin Rasyid bin Abdul Aziz bin Su'aidan, *Tadzkir Al Fuhul*

*bitarjihah Masail Al Ushul*.

Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pemilihan Kepala Daerah*,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, 2011.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **C. Jurnal, Skripsi dan Disertasi**

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung Universitas Padjadjaran, 1996.

Sadhu Bagas Suratno "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3 (2017), pp. 164-174, Desember 2017, Jember.

Ujang Charda S, "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik (*Potential for abuse of authority by the administrative officers of the state of public policy making and execution*)", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September 2012, hlm.601-602.

Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum

*(The Use Of Discretion In The Formation Of a Legal Product”* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01 - Maret 2016 : 53 – 62.

**Internet :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019*.

Dony Indra Ramadhan, *Eks Bupati Bandung Barat Abubakar Divonis 5,5 Tahun Bui*, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4347551/eks-bupati-bandung-barat-divonis-55-tahun-bui>, diakses pada 2 oktober 2019.

KBBI “Jabatan” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jabatan> diakses pada 1 November 2019.

KBBI “Amanah” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amanah> diakses pada 1 November 2019.

KBBI “Jujur” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jujur> diakses pada 1 November 2019.

KBBI “Akuntabilitas” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas> diakses pada 1 November 2019.

KBBI, “*Penyalahgunaan Wewenang*” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan%20wewenang> diakses pada 26 Desember 2019.

Sejarah singkat lahirnya Kabupaten Bandung Barat, dari <https://www.bandungbaratkab.go.id/> diakses pada 27 November 2019.

Selayang Pandang Kabupaten Bandung Barat, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057> diakses pada 28 November 2019.

Tentang Kabupaten Bandung Barat, Geografis, dari <https://www.bandungbaratkab.go.id/> diakses pada 28 November 2019.

Demografis Kabupaten Bandung Barat, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057> diakses pada 28 November 2019.

Wiktionary Indonesia “Melampaui Wewenang” dari

[https://id.m.wiktionary.org/wiki/melampaui\\_wewenang](https://id.m.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang) diakses pada 26

Desember 2019.

